

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI

Supiani

supiani_upi17@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The policy implementation of the village secretaries as the civil servant aimed at creating well-order administration of government and development as well as service, and effective people empowerment. The purpose of this study is to analyze and study the implementation of the village secretaries as the civil servants and to investigate the supporting and inhibit factors of that policy which was studies based on the model of policy implementation of George C Edward III on the aspect of communication, resources, disposition and bureaucracy. This type of study was qualitative. The number of informant was 12 persons who were selected by using purposive sampling technique. The result of study reveals that the policy implementation of the appointment of village secretaries as the civil servants had not yet been optimal as indicated by the following results: (1) Communication: there was no socialization from regional government about the policy of regulation of PP 45 2007, (2) the resources of village secretaries did not fulfill with the requirement due to the old age and had no latest academic certificate possession. (3) the disposition of attitude and behavior of the implementor in the policy implementation of village secretary appointment to be civil servant did not run well: some village had vacuum of village secretary position. (4) the bureaucracy structure of regional government in the policy implementation had worked well although there was a lack coordination in the appointment of village secretary position. The inhibit factor of the policy implementation was lack of socialization from regional government about the policy and the policy and the regulation of PP 45 2007. The supporting factor was positive responses from the village secretaries for their appointment as the civil servants.

Keywords: *Implementation, village secretary, civil servant*

Pemerintahan Desa adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 menerangkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana perangkat Desa dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Lebih lanjut pasal 202 ayat (3) menyatakan bahwa "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan".

Ayat dari pasal tersebut menjelaskan bahwa Sekretaris Desa (Sekretaris Desa) diisi

dari Pegawai Negeri Sipil. Peneliti menilai bahwa adanya ketentuan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Hal tersebut menurut peneliti cukup logis, mengingat posisi Sekretaris Desa bisa dikatakan sebagai 'otak' dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dengan kata lain bagian Sekretariat Desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk Sekretaris Desa

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di wilayah Dampal Selatan ternyata banyak menuai berbagai permasalahan dan kendala terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai PP 45 tahun 2005. Hal ini terlihat bahwa dari 12 desa di Kecamatan Dampal Selatan ternyata hanya ada 3 desa yang Sekretaris Desanya memenuhi syarat dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan 9 desa lainnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di antaranya karena usia telah melebihi 51 tahun, ijasah tidak ada (hilang).

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Desa pada 9 desa di Kecamatan Dampal Selatan tersebut, dan untuk memenuhi kekosongan maka sesuai bunyi Pasal 25 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa dilakukan Pengangkatan Sekretaris Desa oleh Bupati Tolitoli yang dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

Untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara Pengangkatan Sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah hanya memberikan surat penyampaian untuk mengumpulkan berkas bagi para Sekretaris desa melalui Camat yang diteruskan ke

kantor-kantor desa. Setiap Sekretaris desa diwajibkan untuk mengumpulkan berkas seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, dalam kebijakan ini tidak semua Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS karena tidak didukung oleh Sumber daya manusia tidak memenuhi persyaratan tidak melengkapi berkas ijasah terakhir tidak ada dan umurnya telah melewati ketentuan PP 45 tahun 2007 yaitu sekdes menjabat sebelum tanggal 15 oktober 2004 dan melaksanakan tugas jabatannya hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini

Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa dari Unsur Pegawai Negeri Sipil ini telah membawa konflik bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Dampal Selatan dan memunculkan berbagai reaksi penolakan dari para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat. Penolakan tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya Sosialisasi dan komunikasi atas pelaksanaan PP 72 Tahun 2005 dan PP 45 Tahun 2007 antara pihak Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dengan para Kades, perangkat desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Dampal Selatan
2. Masih banyaknya Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai PP 45 Tahun 2007
3. Adanya kecenderungan penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PP 72 Tahun 2005

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada bulan Juli 2013 di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, dari 12 desa hanya ada 3 desa yang Sekretaris Desanya di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan selebihnya (9 desa) tidak memenuhi Persyaratan sesuai PP 45 Tahun 2007 dan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan

Sekretaris Desa. Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa di Kecamatan Dampal Selatan, Camat Dampal Selatan mengusulkan pengangkatan pejabat Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (pegawai kecamatan) yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa. Namun setelah SK pengangkatan Sekretaris Desa diterbitkan dan pejabat yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas ternyata mendapat penolakan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta masyarakat, karena beberapa hal antara lain:

1. Sekretaris Desa tidak patuh dan loyal kepada Kepala Desa karena menganggap Kepala Desa bukan atasannya.
2. Sekretaris Desa sering tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Warga desa menghendaki pejabat sekretaris desa berasal dari desa yang bersangkutan

Dari hasil observasi awal peneliti tentang kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Dampal Selatan menurut Edward III dilihat dari aspek komunikasi tidak ada sosialisasi Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS karena masih banyak sekretaris desa belum paham tentang peraturan pemerintah tersebut, dari aspek sumber daya belum maksimal karena masih banyak sekdes yang tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 sehingga tidak diangkat menjadi PNS karena tidak mempunyai ijasah terakhir dan batas umur sesuai PP 45 tahun 2007, dari aspek disposisi sikap perilaku implementor sudah mendukung kebijakan ini karena dalam pengangkatan sekdes ini sudah dilaksanakan sesuai aturan, namun dari struktur birokrasi belum efektif karena ada kepala desa menolak sekretaris desa yang diisi oleh pegawai negeri sipil sehingga mengakibatkan banyak terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa di desa khususnya di kecamatan Dampal Selatan

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, yang dikaji dengan model implementasi kebijakan George C Edward III dengan variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan terdiri dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Menurut Winarno (2012: 37), menyatakan bahwa suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Sedangkan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sedangkan menurut Grindle dalam Winarno (2012: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

METODE

Metode yang dilakukan dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Pengangkatan Sekretaris desa menjadi PNS adalah penelitian kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Informan dalam penelitian ini adalah unsur pemerintah kecamatan dan aparatur desa, peneliti meyakini bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai informan adalah mereka yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti, menyangkut implementasi Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan Waktu penelitian dilaksanakan

selama 3 (tiga) bulan mulai 26 September 2013 sampai 25 Desember 2013.

Teknik pengumpulan data Proses pengambilan data primer dilakukan dengan: observasi, wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini, instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan pada fokus penelitian dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada variable model implementasi kebijakan George C Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Edward III dalam Subarsono (2008: 88), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Dari empat variabel dijelaskan berikut ini.

Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Dampal Selatan belum maksimal karena tidak ada sosialisasi langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli kepada semua Sekretaris Desa di Kecamatan Dampal Selatan, Sosialisasi dari pemerintah daerah tidak ada, hanya berupa surat untuk para Sekretaris Desa, surat tersebut berupa pemberitahuan untuk memasukkan berkas kelengkapan persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan tetapi tidak dukung oleh regulasi yang secara intensif secara prosedural dalam bentuk juknis sehingga para sekretaris desa, kepala desa tidak terlalu memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak ada

sosialisasi dari Pemerintah Daerah yang ada hanya surat pemberitahuan dari Kantor Kecamatan untuk para Sekretaris Desa untuk memasukkan berkas kelengkapan persyaratan sesuai PP 45 tahun 2007. Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Pemerintah untuk menindak lanjuti Undang-undang sebelumnya. Pemerintah Daerah sebaiknya mengambil langkah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah hanya memberikan surat penyampaian untuk mengumpulkan berkas untuk para Sekretaris desa melalui Camat yang diteruskan ke kantor-kantor desa. Setiap Sekretaris desa diwajibkan untuk mengumpulkan berkas seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah tersebut meliputi:

1. Surat Keputusan dan Pengangkatan dalam jabatan Sekdes
2. Akta kelahiran atau dokumen lain yang terdapat tempat dan tanggal lahir bersangkutan
3. Ijasah pendidikan terakhir

Setelah berkas-berkas itu terkumpul dibagian organisasi dan kepegawaian organisasi dan kepegawaian, maka disusun data sekretaris desa diseluruh Kabupaten. Data yang disusun dilakukan penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 45 Tahun 2007.

Sumberdaya

Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Dampal Selatan terkendala pada aspek sumber daya manusia sehingga dalam pelaksanaan verifikasi data ada beberapa Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai PP 45 tahun 2007. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 khususnya pada pasal 25 ayat (1) yang mensyaratkan pengangkatan Sekretaris Desa dari unsur

pendidikan adalah minimal lulusan SLTA, namun dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS nota bene melazimkan untuk tamatan SD dan SLTP, maka wajarlah manakala ditemui sejumlah keterbatasan sekretaris desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu penyelenggara kegiatan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan penyelenggara kegiatan surat menyurat kearsipan dan laporan belum efektif

Sumber daya manusia khususnya Sekretaris Desa di Kecamatan Dampal Selatan menunjukkan kualitas sumber daya manusia masih belum berjalan secara efektif. Setelah data yang disusun dan dilakukan penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 45 Tahun 2007, hasil yang diperoleh mengungkapkan bahwa hanya ada 3 (tiga) sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS di Kecamatan Dampal Selatan yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) sekretaris desa yang tidak bisa diangkat menjadi PNS karena tidak memenuhi persyaratan batasan umur lebih dari 51 tahun dan tidak mempunyai ijasah terakhir, dan 6 (enam) desa hasil dari pemekaran dari pemerintah daerah pada tahun 2011-2013 terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa karena tidak pengangkatan sekretaris desa, adapun desa terjadi kekosongan akan diisi oleh pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 pasal 25 ayat (1) sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan

- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
- d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat sudah menugaskan beberapa staf dari Kantor Kecamatan untuk mengisi kekosongan jabatan sekdes tersebut, namun tidak efektif, sekdes yang ditugaskan mendapat penolakan dari kepala desa karena berbagai faktor alasan dari kepala desa tidak cocok, sekdes yang ditugaskan tidak berkualitas, tidak patuh dan loyal kepada kepala desa.

Disposisi

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Dampal Selatan sudah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan PP 45 Tahun 2007. Guna mewujudkan pemerintahan daerah yang maju, professional, serta tercapainya pelayanan publik yang baik, maka organisasi pemerintah desa harus diperkuat, karena kelemahan desa saat ini adalah status perangkatnya yang belum jelas, perangkat desa pada umumnya bekerja atas dasar pengabdian kepada desa. Namun apabila seluruh perangkat desayang diangkat sebagai PNS maka akan memberatkan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengangkatan Sekeretaris desa menjadi Pegawi Negeri Sipil pastilah memiliki tujuan yang baik terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang lebih mandiri dan terdidik. Selain itu denagn adanya ketentuan tersebut maka berimplikasi juga pada level pemerintahan yang lebih tinggi yaitu Pemerintah kabupaten. Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Dampal Selatan adalah baik. Para pelaksana kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil memiliki sikap

atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan

Struktur birokrasi

Penerapan Implementasi Kebijakan terkait Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil memerlukan kesiapan dari pihak Pemerintah Daerah terutama bagaimana aparat Pemerintah Daerah mendukung Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan koordinasi dengan baik meskipun hal ini pmda mengetahui akan terjadi pro dan kontra bagi Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Namun pelaksanaan koordinasi dalam pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa masih kurang optimal. Pelaksanaan koordinasi dalam pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa belum berjalan secara efektif, hal ini tentunya dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa di Kecamatan Dampal Selatan, karena pengisian kekosongan jabatan sekretaris desa oleh pegawai negeri sipil belum tentu akan memberikan perbaikan kepada sistem administrasi desa, ada beberapa kepala desa menolak pegawai negeri sipil yang ditugaskan mengisi kekosongan jabatan sekdes dengan alasan tidak cocok dan terjadi kesalahpahaman antara sekdes dan kepala desa sehingga kepala desa inginkan sekretaris desa berasal dari desa atau perangkat desa yang ada di desa tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil belum efektif, ada beberapa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan masyarakat belum mengetahui jelas apa tujuan kebijakan tersebut karena tidak ada

sosialisasi tentang kebijakan tersebut, secara umum kebijakan ini dapat diterima semua pihak, baik dari sekdes kepala desa, maupun perangkat desa namun dari beberapa Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil belum semuanya memenuhi persyaratan karena usia yang sudah lanjut serta tidak memiliki ijazah terakhir sehingga Sekretaris Desa tersebut tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah cukup baik. Kebijakan ini juga membawa permasalahan tersendiri dalam implementasinya yaitu dalam pengisian kekosongan jabatan Sekdes belum ada koordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dengan stafnya, begitupun dengan pembayaran tunjangan kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai aturan PP 45 tahun 2007.

Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Sosialisasi atas kebijakan ini harus terus dilakukan walaupun implementasinya sudah terlaksana, karena tidak semua masyarakat desa paham akan kebijakan ini
2. Harus diberikan pedoman lebih lanjut terkait dengan tugas-tugas perangkat desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan baik antara Kades dengan Sekdes maupun dengan perangkat desa yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si selaku ketua pembimbing dan Dr. Haslinda Baji, M.Si selaku anggota yang telah memberikan arahan

bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.

Penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kiranya kepada beliau berdua diberikan limpahan berkah, kesehatan, rahmat dan hidayah atas segala amal ibadahnya selama memberikan bimbingan dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (judul asli: *An Introduction to Public Policy Analysis (1981)*), Penyunting: Muhadjir Darwin, Penerjemah Samodra Wibawa dkk. Edisi kedua, Cetakan keempat. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

-----, 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Winarno, B. 2011. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Caps.

-----2012. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Caps.

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Focusmedia.

Bandung. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.